

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

A. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan evaluasi dan analisis sebagaimana telah dikemukakan pada Bab. II Gambaran Umum Kondisi Daerah, selanjutnya dapat dilakukan analisis isu strategis sesuai kewenangan pemerintah daerah. Rumusan permasalahan masing-masing urusan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Pati, diketahui sebagai berikut :

1. Urusan Kewenangan Wajib

a. Pendidikan

- 1) Belum optimalnya perkembangan kualitas pendidikan dasar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- 2) Belum adanya standarisasi biaya pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Pati;
- 4) Rendahnya kesejahteraan guru swasta;
- 5) Belum optimalnya keberpihakan pendidikan kepada siswa kurang mampu dan berprestasi;
- 6) Masih adanya ketidakjelasan status kepemilikan tanah untuk penyelenggaraan pendidikan;
- 7) Adanya penurunan budi pekerti anak usia sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- 8) Belum meratanya distribusi formasi guru;

b. Kesehatan

- 1) Belum optimalnya tata kelola pelayanan kesehatan gratis di puskesmas.
- 2) Belum optimalnya manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah;
- 3) Belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di rumah sakit bagi peserta Jamkesmas dan Jamkesda;
- 4) Masih kurangnya pelayanan rawat inap di puskesmas;
- 5) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat;
- 6) Masih kurangnya sarana dan prasarana serta alat kesehatan pada puskesmas dan rumah sakit daerah;
- 7) Masih tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu yang disebabkan kurangnya gizi pada ibu hamil dan persalinan di rumah;
- 8) Makin meningkatnya penderita HIV/AIDS;
- 9) Masih adanya wilayah endemik berat gangguan akibat kekurangan yodium;
- 10) Masih adanya wilayah desa yang belum mempunyai pusat pelayanan kesehatan desa (PKD);

c. Pekerjaan Umum

- 1) Terjadinya bencana banjir rutin di sepanjang alur sungai Juwana dan sekitarnya;
- 2) Masih banyaknya jalan dan jembatan provinsi, kabupaten dan poros desa yang rusak;
- 3) Kurangnya drainase di sepanjang jalan provinsi dan kabupaten;
- 4) Belum optimalnya peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 5) Tingginya sedimentasi sungai dan bendung;
- 6) Belum tercukupinya kebutuhan air baku pertanian;
- 7) Masih kurangnya tanggul dan talud pengaman di sepanjang alur sungai;
- 8) Masih kurangnya lampu penerangan jalan umum;
- 9) Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor kecamatan.

d. Perumahan

- 1) Masih banyaknya rumah tidak layak huni pada masyarakat berpenghasilan rendah;
- 2) Masih banyaknya keluarga yang belum memiliki rumah;
- 3) Masih adanya kawasan perumahan dengan kualitas lingkungan yang rendah (kumuh);
- 4) Masih banyaknya masyarakat yang kekurangan air bersih khususnya pada musim kemarau;
- 5) Belum terjangkau pelayanan PDAM pada masyarakat yang berada di pedesaan;
- 6) Masih adanya masyarakat yang belum menikmati jaringan listrik;
- 7) Belum optimalnya pembangunan dan penataan drainase pemukiman;

e. Penataan Ruang

- 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- 2) Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana pola ruang;
- 3) Belum tercukupinya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

f. Perencanaan Pembangunan

- 1) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang akurat;
- 2) Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan pembangunan;
- 3) Kurangnya kajian/perencanaan pengembangan bidang ekonomi, infrastruktur, lingkungan dan sosial budaya;
- 4) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan.

g. Perhubungan

- 1) Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada jalur padat dan perlintasan jalan;

- 2) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada terminal dan sub terminal;
- 3) Perlunya relokasi dan pembangunan terminal tipe A dan tipe C;
- 4) Kurangnya pelayanan transportasi darat;
- 5) Belum optimalnya penertiban tonase muatan barang berdasarkan kelas jalan.
- 6) Masih banyaknya angkutan penumpang non standar yang beroperasi.

h. Lingkungan Hidup

- 1) Kurangnya sarana pengelolaan limbah rumah tangga
- 2) Kurang optimalnya sarana pengelolaan sampah;
- 3) Kurangnya pengelolaan dan pemanfaatan limbah pertanian dan industri;
- 4) Kurangnya pengawasan dan penegakan peraturan dalam pengelolaan pesisir pantai;
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah;
- 6) Masih banyaknya pengusaha/industri yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah sehingga terjadi pencemaran lingkungan;

i. Pertanian

- 1) Kurangnya sosialisasi bidang pertanian;
- 2) Kurangnya pengawasan pensertifikatan tanah dan alih fungsi lahan;
- 3) Kurangnya sosialisasi peraturan pengajuan pensertifikatan tanah;
- 4) Banyaknya tanah yang belum bersertifikat;

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Kurangnya pemahaman terhadap manfaat dari akte kelahiran;
- 2) Tingginya biaya pengurusan akte kelahiran bagi anak yang berusia lebih dari 1 (satu) tahun.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- 2) Kurang memadainya ketrampilan tenaga kerja perempuan;
- 3) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 1) Kurangnya keaktifan Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
- 2) Adanya kesenjangan gender dalam ber KB;
- 3) Rendahnya pemahaman terhadap manfaat KB dalam keluarga berkualitas.

m. Sosial

- 1) Masih sering terjadinya kenakalan pemuda yang menjurus pada perbuatan kejahatan;
- 2) Banyaknya pekerja anak dibawah umur sektor in formal;
- 3) Adanya lansia dan penyandang cacat yang terlantar karena tidak punya saudara, anak dan ekonomi lemah;
- 4) Kurang optimalnya penanganan anak terlantar dan pengemis/gelandangan serta orang gila yang berkeliaran;
- 5) Tingginya angka kemiskinan penduduk;
- 6) Kurangnya pembinaan terhadap eks tuna susila;
- 7) Belum optimalnya penanganan korban bencana, tindak kekerasan dan diskriminasi SARA.

n. Ketenagakerjaan

- 1) Tingginya angka pengangguran karena kurangnya ketrampilan dan tersedianya lapangan pekerjaan;
- 2) Kurangnya pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi generasi muda;
- 3) Banyaknya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang belum mentaati peraturan perundang-undangan;
- 4) Rendahnya perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri yang bermasalah;
- 5) Adanya perusahaan yang belum mentaati ketentuan upah minimal kabupaten.

o. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

- 1) Kurangnya akses permodalan pengusaha mikro sehingga produksi tidak optimal;
- 2) Kurangnya pembinaan dan pengembangan UMKM;
- 3) Tingginya suku bunga KUR di tingkat bank penyalur;
- 4) Banyak koperasi yang beroperasi tetapi tidak memenuhi persyaratan perkoperasian;

p. Penanaman Modal

- 1) Rendahnya nilai investasi di Kabupaten Pati;
- 2) Belum optimalnya pelayanan perijinan sesuai standar waktu dan biaya yang ditetapkan;
- 3) Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap mekanisme perijinan investasi;
- 4) Belum berkembang dan profesionalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;

q. Kebudayaan

- 1) Menurunnya eksistensi kebudayaan dan kesenian daerah;
- 2) Kurang berkembangnya kesenian tradisional dan kebudayaan daerah;
- 3) Belum tersalurkannya minat dan bakat kesenian daerah;

- 4) Kurang aktifnya organisasi kesenian dalam pengembangan seni dan budaya daerah;
- 5) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Pati.

r. Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Kurangnya ketersediaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
- 2) Belum optimalnya pembinaan dan penyaluran minat dan bakat olah raga;
- 3) Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan;
- 4) Kurang adanya kebijakan dan kesempatan bagi pengembangan wirausaha bagi pemuda dan karang taruna;
- 5) Kurangnya apresiasi pemerintah dan masyarakat terhadap atlet yang berprestasi.

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Menurunnya semangat dan jiwa nasionalisme;
- 2) Belum optimalnya fasilitasi peran serta TOMA, TOGA, TODA, Ormas dan LSM dalam pembangunan daerah;
- 3) Belum optimalnya mitigasi dan penanggulangan bencana;

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- 1) Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- 2) Kurang optimalnya pelayanan publik aparatur pemerintahan;
- 3) Adanya penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- 4) Banyaknya aparatur pemerintahan yang kurang tertib dan disiplin;
- 5) Kurangnya kompetensi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- 6) Belum tercapainya predikat penatausahaan keuangan yang wajar tanpa pengecualian;
- 7) Rendahnya upaya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah;
- 8) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
- 9) Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah;
- 10) Belum optimalnya sistem pelayanan persandian;
- 11) Belum optimalnya upaya penanggulangan narkoba.

u. Ketahanan Pangan

- 1) Sering terjadinya bencana banjir dan kekeringan di beberapa wilayah yang menyebabkan gagal panen dan kerawanan pangan;
- 2) Kurang berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan;
- 3) Kurangnya upaya diversifikasi pangan;
- 4) Rendahnya akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas;

- 5) Rendahnya skor Pola Pangan Harapan (PPH);
- 6) Banyaknya pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi;
- 7) Kurangnya lumbung pangan masyarakat;
- 8) Terdapatnya daerah rawan pangan.

v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam pemerintahan;
- 2) Kurangnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- 4) Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna di pedesaan;
- 5) Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat desa;
- 6) Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;

w. Statistik

- 1) Kurang validnya data statistik tentang kondisi keluarga miskin;
- 2) Belum tercukupinya data statistik dasar untuk perencanaan pembangunan;
- 3) Belum terintegrasinya sistem pendataan dan informasi;

x. Kearsipan

- 1) Kurang optimalnya pengelolaan kearsipan pemerintahan desa dan SKPD kabupaten;
- 2) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan daerah;
- 3) Kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana kearsipan daerah yang telah ada;

y. Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan layanan informasi kepada masyarakat Kabupaten Pati;
- 3) Kurang tersedianya sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.

z. Perpustakaan

- 1) Kurang tersedianya perpustakaan umum di tingkat desa dan kecamatan;
- 2) Kurang lengkapnya referensi buku di perpustakaan;
- 3) Kurangnya budaya dan minat baca masyarakat.

2. Urusan Kewenangan Pilihan

a. Pertanian

- 1) Tingginya intensitas gangguan hama dan penyakit pertanian;
- 2) Sering terjadinya genangan/banjir di lahan pertanian;
- 3) Sering terjadinya kekurangan air baku di lahan pertanian;
- 4) Banyaknya benih tidak bersertifikat;
- 5) Rendahnya kemampuan petani dalam mengendalikan hama, waktu terjadi ledakan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- 6) Kurangnya pemahaman petani terhadap pola tanam pertanian;
- 7) Banyaknya saluran irigasi usaha tani dan desa yang rusak;
- 8) Kurang tersedianya prasarana jalan produksi usaha tani;
- 9) Kurangnya ketersediaan bibit ternak unggul dan populasi sapi betina produktif;
- 10) Kurangnya peran tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam peningkatan teknologi pertanian;
- 11) Kurangnya fasilitasi akses permodalan bagi petani.

b. Kehutanan

- 1) Tingginya intensitas erosi, longsor dan banjir;
- 2) Kurang optimalnya upaya pelaksanaan reboisasi hutan;
- 3) Kurangnya usaha konservasi Sumber Daya Alam;
- 4) Belum optimalnya penegakan hukum pemanfaatan hutan sesuai fungsinya;
- 5) Terjadinya perubahan cuaca ekstrim akibat pemanasan global;
- 6) Terjadinya alih fungsi hutan menjadi perkebunan rakyat;
- 7) Belum optimalnya penanganan lahan kritis di lereng muria timur.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Tidak terkendalinya penambangan galian C;
- 2) Belum ditegakkannya Perda tentang Pertambangan Galian C;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber energi terbarukan;
- 4) Belum optimalnya usaha pengembangan potensi sumber daya mineral berwawasan lingkungan.

d. Pariwisata

- 1) Kurangnya infrastruktur pendukung menuju obyek wisata;
- 2) Belum optimalnya pengembangan potensi wisata;
- 3) Belum adanya pengembangan wisata bahari;
- 4) Belum adanya pengembangan desa wisata;
- 5) Kurang terawatnya tempat wisata yang ada;
- 6) Rendahnya minat masyarakat berkunjung di obyek wisata lokal;
- 7) Rendahnya minat investor di bidang pariwisata;
- 8) Kurangnya intensitas penyelenggaraan festival budaya di obyek wisata daerah;
- 9) Kurang optimalnya fasilitasi kerjasama pariwisata antar daerah Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang dan Blora (PAKUDJEMBARA)

e. Kelautan dan Perikanan

- 1) Turunnya produktifitas tambak akibat dari kerusakan ekosistem pesisir dan pantai;
- 2) Tingginya sedimentasi di saluran tambak;
- 3) Kurangnya pengembangan teknologi dan inovasi di bidang budidaya tambak;
- 4) Rendahnya penerapan teknologi penangkapan ikan;
- 5) Kurangnya pengembangan teknologi budidaya garam rakyat;
- 6) Kurangnya prasarana dan sarana tambak kapal ikan;
- 7) Kurang optimalnya pengelolaan pusat pelelangan ikan;
- 8) Belum optimalnya penerapan teknologi pengolahan hasil perikanan;
- 9) Kurangnya ketersediaan prasarana jalan usaha perikanan tambak;

f. Perdagangan

- 1) Kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana pasar tradisional;
- 2) Kurangnya pengembangan kapasitas pasar yang sudah tidak bisa menampung pedagang ;
- 3) Banyaknya pasar tradisional yang rusak;
- 4) Belum optimalnya fasilitasi kerjasama perdagangan antar pelaku usaha;
- 5) Belum adanya pasar grosir buah pada sentra-sentra penghasil buah-buahan;
- 6) Belum tersedianya pasar produk unggulan daerah;
- 7) Belum optimalnya pengaturan zonasi pasar modern.

g. Industri

- 1) Belum optimalnya pengembangan industri rumah tangga;
- 2) Kurangnya akses permodalan bagi pengrajin kecil;
- 3) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dalam pengembangan kawasan peruntukan industri;
- 4) Rendahnya daya saing produk industri lokal;
- 5) Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi pengrajin dan *home industry*.

h. Transmigrasi

- 1) Rendahnya kuota transmigran dari pemerintah pusat;
- 2) Terjadinya ketidaksesuaian lokasi transmigrasi dengan pilihan calon transmigran ;
- 3) Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan transmigrasi swakarsa mandiri;
- 4) Masih rendahnya SDM calon transmigrasi.

B. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini yang disajikan pada bab terdahulu dan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Pati pada lima tahun yang akan datang adalah :

1. **Belum optimalnya standar nasional pendidikan dalam kebijakan pendidikan dasar dan menengah.**
Hal ini ditunjukkan dengan belum terpenuhinya 8 (delapan) standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pati.
2. **Belum optimalnya tata kelola bidang kesehatan dan pelayanan puskesmas gratis untuk menjamin pelayanan kesehatan yang baik.**
Kurang validnya data penduduk miskin dan belum optimalnya pelayanan petugas kesehatan serta terwujudnya pelayanan puskesmas gratis
3. **Belum optimalnya pembangunan ekonomi kerakyatan dengan mengutamakan pembangunan bidang pertanian, perikanan, perdagangan dan industri.**
Belum terbangunnya sarana dan prasarana perekonomian rakyat seperti pembangunan dermaga, dok kapal dan kolam tambat kapal serta revitalisasi pasar tradisional .
4. **Masih rendahnya daya saing, akses permodalan usaha dan pemasaran hasil produksi UMKM.**
Belum optimalnya lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam, UED SP, BKM, BPR dalam peningkatan permodalan usaha, peningkatan pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan perdagangan kecil dan menengah.
5. **Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial.**
Masih banyaknya infrastruktur yang rusak baik jalan, jembatan, irigasi untuk segera dibenahi guna mendukung mobilitas penduduk di bidang ekonomi dan pembangunan.
6. **Belum optimalnya penataan birokrasi dan kurangnya kemampuan aparatur pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik.**
Masih adanya penempatan aparatur belum sesuai kompetensinya sehingga pelaksanaan pelayanan publik belum sesuai yang diharapkan atau Standart Pelayanan Minimal (SPM).
7. **Masih rendahnya realisasi penanaman modal di Kabupaten Pati**
Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam merespon penanam modal/investor sehingga menghambat realisasi penanaman modal maupun peluang kerja.
8. **Tingginya angka pengangguran, penduduk miskin dan rendahnya kualitas tenaga kerja.**
Hal ini ditunjukkan dengan angka pengangguran terbuka sebesar 7,37% dan persentase penduduk miskin sebesar 14,48 %.
9. **Belum optimalnya mitigasi penanggulangan bencana.**
Hal ini ditunjukkan dengan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam mengantisipasi maupun penanggulangan bencana baik bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung maupun bencana kekeringan.